

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius bagi beberapa negara di dunia. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional yang diakibatkan dari berbagai faktor ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan yang tergolong rendah dapat dijadikan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini dapat menggambarkan situasi atau keadaan suatu individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat (Ginting & Rasbin, 2010).

Secara umum, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan mayoritas mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya negara seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Selain itu, kemiskinan juga menghambat pembangunan negara (Fitria, 2022). Indonesia sebagai negara berkembang masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan hingga tahun 2024. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Indonesia di Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang.

Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi setiap tahunnya tentu akan berpengaruh kualitas kehidupan dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Kondisi inilah yang harus diperhatikan oleh Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) diketahui tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat terbilang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera seperti yang ditampilkan oleh tabel 1.1.

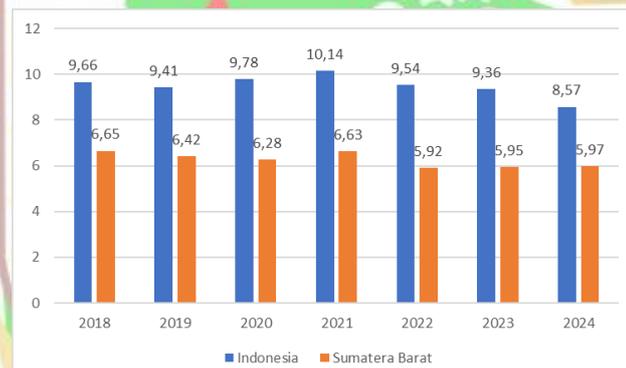
**Tabel 1.1: Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2018-2024**

| Provinsi         | Tahun |       |       |       |       |       |       | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>Per Tahun |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
|                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                       |
| NAD              | 15,97 | 15,32 | 14,99 | 15,33 | 14,64 | 14,45 | 14,23 | -1.90%                                |
| Sumatera Utara   | 9,22  | 8,83  | 8,75  | 9,01  | 8,42  | 8,15  | 7,99  | -2.36%                                |
| Sumatera Barat   | 6,65  | 6,42  | 6,28  | 6,63  | 5,92  | 5,95  | 5,97  | -1.78%                                |
| Riau             | 7,39  | 7,08  | 6,82  | 7,12  | 6,78  | 6,68  | 6,67  | -1.69%                                |
| Jambi            | 7,92  | 7,60  | 7,58  | 8,09  | 7,62  | 7,58  | 7,10  | -1.81%                                |
| Sumatera Selatan | 12,80 | 12,71 | 12,66 | 12,84 | 11,90 | 11,78 | 10,97 | -2.54%                                |
| Bengkulu         | 15,43 | 15,23 | 15,03 | 15,22 | 14,62 | 14,04 | 13,56 | -2.13%                                |

| Provinsi               | Tahun |       |       |       |       |       |       | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>Per Tahun |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
|                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                       |
| Lampung                | 13,14 | 12,62 | 12,34 | 12,62 | 11,57 | 11,11 | 10,69 | -3.38%                                |
| Kep.Bangka<br>Belitung | 5,25  | 4,62  | 4,53  | 4,90  | 4,45  | 4,62  | 4,55  | -2.36%                                |
| Kep. Riau              | 6,20  | 5,90  | 5,92  | 6,12  | 6,24  | 5,69  | 5,37  | -2.37%                                |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Meskipun demikian, hanya Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan angka kemiskinan dua tahun terakhir seperti yang ditunjukkan gambar 1.1. Trend peningkatan ini terlihat beberapa tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Sumatera Barat berada pada angka 6,28%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 pada angka 6,63%. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat sempat mengalami penurunan, namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 pada angka 5,97%.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1: Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2024

Adanya tren kenaikan persentase penduduk miskin menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan ekonomi maupun sosial di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu masih terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan angka kemiskinan masih di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan antar kabupaten/kota. Hal ini jika tidak disikapi dengan serius akan menyebabkan permasalahan yang lebih parah seperti pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan ketimpangan antar kelas sosial. Di sisi lain, keadaan ini perlu pendekatan spesifik pemerintah provinsi terhadap daerah yang mana setiap kabupaten/kota perlu solusi yang berbeda dalam

menghadapi kemiskinan. Dengan demikian, riset lebih lanjut diperlukan guna mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah et al (2023) mengungkap ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah), IPM (Indeks Pembangunan Manusia), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Berdasarkan data BPS diketahui jumlah masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang memeluk agama Islam yaitu sebanyak 5,61 juta jiwa. Sebagai provinsi dengan mayoritas masyarakat beragama Islam Provinsi Sumatera Barat memegang erat prinsip-prinsip Agama Islam dalam pergaulan masyarakat (Lutfi, 2023). Salah satu bentuk prinsip dari ajaran Islam adalah membayarkan zakat. Oleh karena itu distribusi ZIS dapat dijadikan roda penggerak perekonomian serta cara yang efektif dalam mengurangi masalah kemiskinan (Putri, 2020).

Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) termasuk filantropi Islam yang berperan sebagai bantuan finansial dalam menunjang kehidupan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan (Yuliana et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi islam, kemiskinan dapat berkurang dengan adanya penyaluran dana ZIS. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Hany & Islamiyati (2020) yaitu dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan dengan tepat terbukti efektif dalam menekan kemiskinan.



Sumber: Badan Zakat Nasional (2023)

**Gambar 1.2: Pengumpulan dan Penyaluran Distribusi Dana Zakat, infak, dan Sedekah (ZIS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023**

Merujuk pada gambar 1.2 disimpulkan terdapat fluktuasi pada alokasi penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Sumatera Barat. Secara teori, pertumbuhan pada dana ZIS memiliki kontribusi yang positif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini disebabkan zakat berperan sebagai instrumen yang menggerakkan individu untuk mengeluarkan hartanya agar dapat dimanfaatkan secara produktif (Widiastuti & Kosasih, 2021). Dana ZIS yang diterima dapat dipergunakan dalam mencukupi keperluan sehari-hari. Selain itu, dana ZIS juga dapat digunakan dalam membangun usaha yang dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan meningkatkan pendapatan dan mendorong ekonomi menjadi lebih baik sehingga dapat terbebas dari kemiskinan (Munandar, 2020).

Martaliah et al (2023) dalam studinya menemukan korelasi negatif antara dana zakat dan kemiskinan. Adanya distribusi dana ZIS memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh kebutuhan pokok mereka. Situasi ini, mendorong masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. Namun Nafi'ah (2021) menemukan hal sebaliknya, dimana dana ZIS memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Adanya perbedaan ini menjadi daya tarik dalam meneliti penelitian ini.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkirakan sebagai faktor lain yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari perhitungan 3 indikator utama, yakni kualitas kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak (Hawari, 2022). Jika semua indikator IPM tersebut terpenuhi maka akan terwujudnya SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui nilai IPM Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 pada angka 73,75. Angka IPM yang semakin meningkat menunjukkan adanya perubahan untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas (Regina et al., 2025). Masyarakat dengan SDM yang berkualitas cenderung mendistribusikan pendapatan mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, hal ini nantinya yang akan mengurangi angka kemiskinan (Salsabila et al., 2025). Pernyataan ini didukung oleh hasil studi

Karimah et al (2023) yang mengungkapkan korelasi negatif dan signifikan antara IPM dengan tingkat kemiskinan.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan juga dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan pendorong dalam menekan angka kemiskinan. Hal ini dipertegas pada teori *trickle-down effect* yang mengemukakan jika pertumbuhan PDB dan PDRB dapat membuka kesempatan kerja baru serta prospek ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan (Nainggolan, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu ketika mengalami peningkatan dari periode waktu sebelumnya. Menurut data pada Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2021 sampai 2023, walaupun sempat mengalami penurunan dikarenakan covid pada tahun 2020 hingga pada angka -1,61%. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini didukung oleh hasil studi Salsabil (2023) yang menemukan korelasi yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti kemiskinan dapat ditekan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, diketahui masih terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan teori mengenai Zakat Infaq, dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan rincian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2018-2023?

2. Bagaimana pengaruh Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2018-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai pengaruh Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2018-2023.
2. Untuk menganalisis mengenai pengaruh Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2018-2023.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai ruang implementasi teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis suatu masalah serta menemukan solusi berdasarkan teori dan data yang ada.
2. Bagi pemerintah dan masyarakat, studi ini bisa dipakai sebagai sumber informasi dan referensi dalam menciptakan strategi untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
3. Bagi akademisi, studi ini dapat dipergunakan sebagai wadah ilmu baru bagi peneliti di masa depan yang mengeksplorasi topik serupa terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna mencegah timbulnya penyimpangan dan perluasan konsep, maka penelitian ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2023 yang meliputi data Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data pertumbuhan ekonomi yang diambil dari data laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dan data tingkat kemiskinan yang diambil dari data persentase jumlah penduduk miskin.

